

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Biologi Tanaman Kelapa Sawit

##### a. Klasifikasi Kelapa Sawit

Semua tumbuhan memiliki klasifikasi sesuai dengan genus dan spesiesnya. Klasifikasi tumbuhan bertujuan untuk memudahkan dalam mengenali atau mengidentifikasi secara ilmiah. Menurut Pahan (2008), tanaman kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut :

Divisi : *Embryophyta Siphonagama*

Kelas : *Angiospermae*

Ordo : *Monocotyledonae*

Famili : *Arecaceae* (dahulu disebut *Palmae*)

Subfamili : *Cocoideae*

Genus : *Elaeis*

Spesies : 1. *E. guineensis* Jacq.

2. *E. oleifera* (H.B.K.) Cortes

3. *E. odora*

## **b. Karakteristik Tanaman Kelapa Sawit**

Kelapa sawit adalah tanaman perkebunan/ industri berupa pohon batang lurus dari famili *Palmae*. Kelapa sawit merupakan tanaman komoditas pertanian yang cukup penting di Indonesia dan masih memiliki prospek pengembangan yang cukup cerah. Komoditas kelapa sawit baik berupa bahan mentah maupun hasil olahannya, menduduki peringkat ketiga penyumbang devisa nonmigas terbesar bagi negara setelah karet dan kopi. Hal ini menjadikan kelapa sawit sebagai tanaman penghasil minyak nabati yang dapat diandalkan, karena minyak yang dihasilkan memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan minyak yang dihasilkan oleh tanaman lain. Keunggulan tersebut diantaranya memiliki kadar kolesterol rendah bahkan tanpa kolesterol.

Menurut Sihotang (2010), bagian yang paling utama untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga dapat diolah menjadi bahan baku minyak alkohol, sabun, lilin, dan industri kosmetika. Sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran makanan ternak dan difermentasikan menjadi kompos. Tandan kosong dapat dimanfaatkan untuk mulsa tanaman kelapa sawit, sebagai bahan baku pembuatan *pulp* dan pelarut

organik, dan tempurung kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar dan pembuatan arang aktif.

## **2. Budidaya Tanaman Kelapa Sawit**

### **a. Syarat Tumbuh**

#### 1) Iklim

Sihotang (2010) mengungkapkan bahwa daerah pengembangan tanaman kelapa sawit yang sesuai berada pada 15°LU-15°LS.

Ketinggian pertanaman kelapa sawit yang ideal berkisar antara 1-500 m dpl. Lama penyinaran matahari rata-rata 5-7 jam /hari. Curah hujan tahunan 1.500-4.000 mm. Temperatur optimal 24-28<sup>0</sup>C.

Kecepatan angin 5-6 km/jam untuk membantu proses penyerbukan.

Kelembaban optimum yang ideal sekitar 80-90%.

#### 2) Tanah

Kelapa sawit dapat tumbuh pada jenis tanah podzolik, latosol, hidromorfik kelabu, alluvial atau regosol. Nilai pH yang optimum adalah 5,0-5,5. Kelapa sawit baik dibudidayakan pada tanah yang gembur, subur, datar, memiliki drainase yang baik dan memiliki lapisan solum yang dalam tanpa lapisan padas. Kondisi topografi pertanaman kelapa sawit sebaiknya tidak lebih dari 15° (Sihotang, 2010).

## b. Teknis Budidaya

Keberhasilan budidaya suatu tanaman dipengaruhi banyak faktor, antara lain:

### 1) Kondisi lingkungan lahan

Risza (1994) mengemukakan bahwa tanaman kelapa sawit sering ditanam pada areal/ lahan bekas hutan (*new planting*), bekas perkebunan karet atau lainnya (konversi), bekas tanaman kelapa sawit (*replanting*). Pembukaan lahan secara mekanis pada areal bukaan baru dan konversi terdiri dari beberapa pekerjaan, yakni:

- a) menumbang; yaitu memotong pohon besar dan kecil dengan mengusahakan agar akarnya terlepas dari tanah;
- b) merumpuk, yaitu mengumpulkan dan menumpuk hasil tebangan untuk memudahkan pembakaran;
- c) merencek dan membakar, yaitu memotong dahan dan ranting kayu yang telah ditumpuk agar dapat disusun sepadat mungkin, setelah kering lalu dibakar; dan
- d) pengolahan tanah secara mekanis.

### 2) Penyediaan benih

- a. Penyediaan benih kelapa sawit diperoleh dari sumber benih kelapa sawit, yakni sumber benih yang baik dapat diperoleh dari balai-balai penelitian kelapa sawit, terutama oleh Marihat Research Station dan Balai Penelitian Perkebunan Medan.  
Dalam penyediaan benih kelapa sawit, balai-balai penelitian

tersebut mempunyai kebun induk yang baik dan terjamin dengan pohon induk tipe *Delidura* dan pohon bapak tipe *Pisifera* terpilih.

- b. Penyediaan benih sendiri, yakni untuk memperoleh buah/ benih yang baik, penyerbukan yang terjadi pada bunga betina dari pohon induk harus dilakukan secara terkontrol. Penyerbukan harus dilaksanakan secara buatan. Dalam penyerbukan secara buatan, pohon induk untuk bunga betina yang digunakan adalah tipe *Dura* atau *Delidura* terpilih seperti terdapat di Marihat Research Station, sedangkan sebagai pohon induk bunga jantan digunakan tipe *Pisifera* yang juga tersedia di Marihat Research Station.

### 3) Persediaan dan persiapan bibit

Persediaan bibit kelapa sawit menurut Risza (1994) adalah sebagai berikut:

- a. Bibit harus tersedia cukup dalam kondisi umur yang sesuai.
- b. Bibit yang normal untuk dipindahtanamkan ke lapangan adalah umur 10-12 bulan.
- c. Khusus untuk areal tanaman baru (TB) bekas hutan, bibit umur 12-18 bulan lebih baik, karena bibit yang lebih tua kurang disenangi tikus, babi, dan landak (Risza, 1994).

#### Pembibitan kelapa sawit

Pahan (2008) berpendapat bahwa lokasi/ areal untuk pelaksanaan pembibitan dengan persyaratan harus datar dan rata, dekat dengan

sumber air, dan letaknya sedapat mungkin di tengah-tengah areal yang akan ditanami dan mudah diawasi. Lahan pembibitan harus diratakan dan dibersihkan dari segala macam gulma dan dilengkapi dengan instalasi penyiraman (misalnya tersedia *springkle irrigation*), serta dilengkapi dengan jalan-jalan dan parit-parit drainase. Luas kompleks pembibitan harus sesuai dengan kebutuhan. Membangun pembibitan terutama ditujukan untuk menghasilkan bibit kelapa sawit yang bermutu tinggi dan tersedia untuk penanaman di lapangan pada saat persiapan lapangan telah selesai dilakukan (Pahan, 2008).

#### 4) Pemeliharaan tanaman kelapa sawit

##### a. Penyulaman

Penyulaman dilakukan untuk mengganti tanaman yang mati atau tumbuh kurang baik. Saat menyulam yang baik adalah pada musim hujan. Bibit yang digunakan harus seumur dengan tanaman yang disulam yaitu bibit berumur 10-14 bulan.

Banyaknya sulaman biasanya sekitar 3-5% setiap hektarnya.

Cara melaksanakan penyulaman sama dengan cara menanam bibit.

##### b. Penanaman tanaman penutup tanah

Tanaman penutup tanah (tanaman kacang, *Legume Cover Crop*) pada areal tanaman kelapa sawit sangat penting karena dapat memperbaiki sifat-sifat fisika, kimia dan biologi tanah, mencegah erosi dan mempertahankan kelembaban tanah, serta menekan pertumbuhan gulma. Penanaman tanaman kacang

sebaiknya dilaksanakan segera setelah persiapan lahan selesai.

Jenis-jenis tanaman kacang yang umum di perkebunan kelapa sawit adalah *Centrosema pubescens*, *Colopogonium mucunoides* dan *Pueraria javanica*. Biasanya penanaman tanaman kacang ini dilakukan tercampur (tidak hanya satu jenis).

c. Membentuk piringan (bokoran, *circle weeding*)

Piringan di sekitar pokok (pohon kelapa sawit) harus tetap bersih. Oleh karena itu tanah di sekitar pokok dengan jari-jari 1-2 meter dari pokok harus selalu bersih dan gulma yang tumbuh harus dibabat, disemprot dengan herbisida.

d. Pemupukan

Jenis pupuk yang diberikan adalah pupuk N, P, K, Mg dan B (Urea, TSP, KCl, Kiserit dan Borax). Pemupukan ekstra dengan pupuk Borax pada tanaman muda sangat penting, karena kekurangan Borax (*Boron deficiency*) yang berat dapat mematikan tanaman kelapa sawit. Dosis pupuk yang digunakan disesuaikan dengan anjuran Balai Penelitian untuk TBM (Tanaman Belum Menghasilkan). Untuk tanaman menghasilkan dosis yang digunakan berdasarkan analisis daun. Dosis pemupukan tergantung pada umur tanaman.

e. Pemangkasan daun

Maksud pemangkasan daun adalah untuk memperoleh pokok yang bersih, jumlah daun yang optimal dalam satu pohon dan

memudahkan panen. Memangkas daun dilaksanakan sesuai dengan umur/ tingkat pertumbuhan tanaman.

f. Pengendalian hama dan penyakit

Pahan (2008) juga mengungkapkan bahwa pengendalian hama dan penyakit merupakan keputusan secara sadar dalam memanfaatkan materi, energi, dan tenaga untuk memperoleh keuntungan tertentu. Hama yang sering menyerang tanaman kelapa sawit adalah ulat api, ulat kantong, tikus, rayap, *Adoretus* dan *Apogonia*, serta babi hutan. Adapun penyakit yang menjadi masalah tanaman kelapa sawit antara lain, penyakit-penyakit daun pada pembibitan, penyakit busuk pangkal batang (*ganoderma*), penyakit busuk tandan buah (*marasmius*), dan penyakit busuk pucuk (*spear rot*).

**c. Panen**

Dalam melakukan pemanenan kelapa sawit terdapat beberapa kriteria matang panen untuk memastikan kualitas tandan buah segar yang dipanen. Kriteria matang panen antara lain:

- i. Kriteria matang panen ditentukan pada saat kandungan minyak dalam daging buah maksimal dan kandungan asam lemak bebas terendah.
- ii. Berdasarkan penyelidikan, kriteria matang panen yang paling baik adalah 2 brondolan/kg berat tandan.



- iii. Alternatif lain yang perlu dipertimbangkan adalah masalah pencurian buah dan banyaknya pengusaha yang membuka tanah miring berat sebagai kebun. Oleh karena itu dalam menentukan kriteria matang panen ada 4 alternatif lain, yakni:
1. Untuk areal rata dengan kemiringan  $0^{\circ}$ - $12^{\circ}$  dan tidak ada gangguan pencurian menggunakan kriteria 2 brondolan/ kg tandan.
  2. Untuk areal sedang dengan kemiringan  $12^{\circ}$ - $20^{\circ}$  dan tidak ada gangguan pencurian menggunakan kriteria 1 brondolan/ kg tandan.
  3. Untuk areal terjal dengan kemiringan  $> 20^{\circ}$  dan tidak ada gangguan pencurian menggunakan kriteria 0,5 brondolan/ kg tandan.
  4. Untuk areal rawan pencurian, tenaga kerja sulit dan mahal menggunakan kriteria 2 brondolan/ tandan (Risza, 1994).
- iv. Keempat alternatif tersebut di atas sebaiknya diuji coba, mana yang paling efektif dan sesuai dengan daerah tersebut: Apakah 2 brondolan/kg tandan atau 1 brondolan/ kg tandan atau 0,5 brondolan/ kg tandan atau 2 brondolan/ tandan.
- v. Sebagai tolok ukur penilaian buah kelapa sawit telah matang saat panen adalah perolehan minyak dan inti kelapa sawit per hektar (Risza, 1994).

#### d. Produksi

Pahan (2007) mengungkapkan bahwa kurva profil produksi kelapa sawit selama 1 siklus dimulai dari saat tanaman menghasilkan TBS sampai saat-saat akan diremajakan (*replanting*) berbentuk kuadrat seperti lonceng. Tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit akan meningkat tajam dari umur 3-7 tahun (periode tanaman muda, *young*), mencapai tingkat produksi maksimal pada umur sekitar 15 tahun (periode tanaman remaja, *prime*), dan mulai menurun secara gradual pada periode tanaman tua (*old*) sampai saat-saat menjelang peremajaan (*replanting*).

Masing-masing genetik tanaman kelapa sawit D x P yang dikeluarkan oleh institusi penghasil benih kelapa sawit mempunyai karakteristik tersendiri dalam produksi TBS. Sebagai contoh, pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa varietas D x P Marihat memperlihatkan kecenderungan peningkatan hasil yang lebih progresif pada tahun-tahun awal mulai menghasilkan.

Tabel 5. Produksi tanaman kelapa sawit D x P Marihat pada berbagai umur tanaman

Umur (tahun)	Produksi TBS (ton)
3	5,0
4	9,0
5	13,5
6	15,0
7	18,0
8	21,0
9	22,0
10	22,1
11	22,3
12	22,4
13	22,5
14	21,0
15	21,0
16	20,0
17	19,8
18	18,5
19	18,0
20	16,5
21	16,0
22	15,0
23	14,5
24	13,5
25	13,0

Sumber: Syukur dan Lubis, 1989

Bahan tanaman kelapa sawit unggul merupakan faktor penentu dalam peningkatan produksi. Bahan tanaman kelapa sawit yang umum ditanama di perkebunan komersial yaitu persilangan *dura x pisifera* (D x P) yang disebut *tenera*. Pengendalian mutu kecambah sangat diperlukan dari proses persilangan sampai panen di lapangan (tanpa kontaminasi), pengujian *viabilitas* dan embrio di laboratorium, serta proses pengecambahan sampai pengemasan. Penggunaan teknik kultur jaringan dapat menghasilkan tanaman kelapa sawit yang mampu

berproduksi 30% lebih banyak dari tanaman biasa. Dengan teknik pemuliaan tanaman konvensional, PT Socfindo menghasilkan kecambah *legitim* dari 3 siklus *Reciprocal Recurrent Selection/ RRS* (masing-masing 8 tahun per siklus) untuk meningkatkan potensi hasil 15-20% per siklus. PPP Marihat (sekarang PPKS Medan) telah menghasilkan 7 varietas D x P seperti yang tercantum pada Tabel 6 (Pahan, 2007).

Tabel 6. Deskripsi potensi pertumbuhan dan produksi berbagai tanaman persilangan D x P asal PPKS Medan dan Socfindo

Deskripsi	PPKS (Eks-PPP Marihat)						PPKS	Socfindo	
	D.Si- numbah	Bah Jambi	Marihat	AVROS	La Me	Yang- ambi	Sima- lungun	DxP (L)	DxP (Y)
<b>A. Sifat Vegetatif</b>									
1. Tinggi tanaman pada umur 8 tahun (m)	3,9	3,9	3,2	4,1	3,5	4,2	3,98	4,83 (*)	5,89 (*)
2. Rata-rata kecepatan meninggi (m/tahun)	0,65	0,65	0,53	0,68	0,58	0,7	0,7-0,8	0,05	0,50
3. Lingkar batang (m)	3,04	3	3,04	3,55	3,04	3,05	n.a.	n.a.	n.a.
4. Panjang daun (m)	6,22	5,97	6,12	6,08	6,06	6,09	5,47	5,01	6,05
5. Produksi daun/tahun	27	27	26	27	28	28	n.a.	31	32
<b>B. Produksi</b>									
1. Umur mulai dipanen (bulan)	30	30	30	30	30	30	28	24	24
2. Jumlah tandan/pohon/tahun	12	13	12	12	14	13	12,9	18,6 (**)	9,9
3. Rata-rata berat tandan (kg)	17	17	17	16	16	16	19,2	13,0 (**)	22,3
4. Produksi minyak (ton/ha/tahun)	7,1	6,9	6,7	6,4	7,0	7,0	7,53	8,5	7,4
5. Ekstraksi minyak (%)	25,6	24,5	24,3	24,8	23,2	24,8	26,5	27,4	26,8
6. Ekstraksi inti (%)	5,2	5,1	5,9	3,2	5,1	4,5	n.a.	4,2	4,2
<b>C. Anjuran kerapatan tanaman/ ha</b>	130	130	143	130	143	130	130-135	143	143

Keterangan: \*) = Tinggi tanaman pada umur 12 tahun      \*\*) = Rata-rata pada umur 6-9 tahun  
 Sumber: Lubis et al. (1990); Basuki (Komunikasi Pribadi, 2006)

### 3. Analisis Usaha Tani

Usaha tani merupakan usaha yang dilakukan oleh petani untuk mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan dari pertanian. Usaha tani sebagai organisasi dari alam yang diusahakan oleh petani, keluarga tani,

lembaga atau badan usaha lainnya yang berhubungan dengan pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Soekartawi (1995), usahatani adalah ilmu yang mempelajari bagaimana seseorang mengalokasikan sumberdaya yang ada secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang tinggi pada waktu tertentu. Usahatani dapat dikatakan efektif apabila petani atau produsen dapat mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki atau yang dikuasai sebaik-baiknya dan dikatakan efisien bila pemanfaatan sumberdaya tersebut menghasilkan keluaran (output) yang melebihi masukan (input).

Ratag (1982) mengatakan bahwa ilmu usahatani merupakan ilmu yang mempelajari cara-cara menentukan serta mengkoordinasikan penggunaan faktor-faktor produksi seefektif mungkin sehingga produksi pertanian memberikan pendapatan keluarga petani yang lebih baik. Definisi ini terkandung satu tujuan utama yaitu peningkatan pendapatan keluarga petani. Tujuan dilakukannya kegiatan usaha tani adalah memperoleh pendapatan. Menurut Marta (2007), pendapatan adalah selisih antara penerimaan dengan semua biaya. Untuk memperoleh laba maka jumlah penerimaan harus lebih besar dari total biaya. Ada beberapa ukuran untuk menghitung pendapatan usahatani yaitu :

- a. Pendapatan usahatani diperoleh dengan menghitung semua penerimaan dikurangi dengan semua pengeluaran,
- b. Pendapatan keluarga tani diperoleh dari menambah pendapatan tenaga kerja keluarga dengan bunga modal milik sendiri dan nilai sewa, dan

- c. Pendapatan petani diperoleh dari menambah pendapatan tenaga kerja dan biaya modal sendiri (Soekartawi, 1995).

Hernanto (1994) mengungkapkan besarnya pendapatan yang akan diperoleh dari suatu kegiatan usahatani tergantung dari beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti modal, luas lahan, tingkat produksi, identitas pengusaha, pertanaman, manajemen, dan efisiensi penggunaan tenaga kerja. Dalam melakukan kegiatan usahatani, petani berharap dapat meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi. Harga dan produktivitas merupakan sumber dari faktor ketidakpastian, sehingga bila harga dan produksi berubah maka pendapatan yang diterima petani juga berubah (Soekartawi, 1990).

Pendapatan usahatani menurut Gustiyana (2004), dibagi menjadi dua pengertian, antara lain: (1) pendapatan kotor, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun yang dapat diperhitungkan dari hasil penjualan atau pertukaran hasil produksi yang dinilai dalam rupiah berdasarkan harga per satuan berat pada saat pemungutan hasil, (2) pendapatan bersih, yaitu seluruh pendapatan yang diperoleh petani dalam satu tahun dikurangi dengan biaya produksi selama proses produksi. Biaya produksi meliputi biaya riil tenaga kerja dan biaya riil sarana produksi.

Pendapatan perseorangan (*personal income*) adalah jumlah seluruh penerimaan yang diterima perseorangan sebagai balas jasa dalam proses

produksi. Pendapatan perseorangan dapat disebut pendapatan kotor, karena tidak semua pendapatan bersih perseorangan jatuh ke tangan pemilik faktor produksi, sebab masih harus dikurangi laba yang tidak dibagi, pajak penghasilan, iuran jaminan sosial dan lain-lainnya.

Menurut Hernanto (1994), ada beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan usahatani, yakni: luas usaha (meliputi areal pertanaman, luas tanaman, luas tanaman rata-rata), tingkat produksi (diukur lewat produktivitas/ha dan indeks pertanaman), pilihan dan kombinasi, intensitas perusahaan pertanaman, serta efisiensi tenaga kerja. Pendapatan yang diterima petani kelapa sawit adalah hasil dari produktivitas kelapa sawit. Tinggi rendahnya produktivitas kelapa sawit tergantung dari komposisi umur tanaman.

#### a. Analisis Efisiensi Produksi Usahatani

Efisiensi produksi menurut Mubyarto (1994) yaitu banyaknya hasil produksi fisik yang dapat diperoleh dari satu kesatuan faktor produksi (input). Menurut Soekartawi (1995), karena total biaya produksi (TC) adalah jumlah dari biaya tetap (FC) dan biaya tidak tetap (VC), maka rumus untuk menghitungnya adalah:

$$TC = FC + VC \dots\dots\dots (1)$$

dimana:

TC = total biaya produksi usaha tani (*total cost*)

FC = biaya tetap (*fixed cost*)

VC = biaya tidak tetap (*variable cost*)

Biaya tetap umumnya didefinisikan sebagai biaya yang relatif tetap jumlahnya, dan terus dikeluarkan walaupun produksi yang diperoleh banyak atau sedikit. Besarnya biaya tetap ini tidak tergantung pada besar kecilnya produksi yang diperoleh. Contohnya pajak, biaya untuk pajak akan tetap dibayar walaupun hasil usaha tani itu besar atau gagal sekalipun. Biaya tetap ini beragam, dan kadang-kadang tergantung dari peneliti apakah mau memberlakukan variabel itu sebagai biaya tetap atau biaya tidak tetap. Contoh biaya tetap antara lain: sewa tanah, pajak, alat pertanian dan alat produksi. Adapun rumus untuk menghitung biaya tetap adalah:

$$FC = \sum_{i=0}^n X_i \cdot P_{xi} \dots\dots\dots (2)$$

dimana:

FC = biaya tetap

Xi = jumlah fisik dari input yang membentuk biaya tetap

Pxi = harga input

n = macam input

(Soekartawi, 1995).

Biaya tidak tetap adalah biaya yang selalu berubah tergantung kepada besar kecilnya produksi. Biaya variabel kira-kira 90-95% dari total biaya. Biaya lain-lain pada umumnya masuk biaya variabel karena besar kecilnya berhubungan langsung dengan besarnya produksi, misalnya pengeluaran-pengeluaran untuk bibit, biaya persiapan dan pengolahan tanah (Mubyarto, 1994). Adapun rumus untuk menghitung biaya tidak tetap adalah:



$$VC = \sum_{i=0}^n X_i \cdot P_{xi} \dots\dots\dots (3)$$

dimana:

VC = biaya tidak tetap

Xi = jumlah fisik dari input yang membentuk biaya variabel

Pxi = harga input

n = macam input

(Soekartawi, 1995).

Menurut Soekartawi (1995), penerimaan usaha tani adalah perkalian antara produksi yang diperoleh dengan harga jual. Pernyataan ini dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TR = Y \cdot P_y \dots\dots\dots (4)$$

dimana:

TR = total penerimaan usaha tani (*total revenue*)

Y = produksi yang diperoleh dalam suatu usaha tani

Py = harga Y

Tujuan akhir dari pengelolaan suatu usaha tani adalah mendapatkan pendapatan. Pendapatan usaha tani adalah selisih antara penerimaan dan semua biaya. Pernyataan tentang pendapatan usahatani tersebut dapat dituliskan dalam rumusan sebagai berikut:

$$Pd = TR - TC \dots\dots\dots (5)$$

dimana:

Pd = pendapatan usaha tani

TR = total penerimaan usaha tani

TC = total biaya produksi usaha tani

Untuk mengetahui apakah usahatani kelapa sawit menguntungkan atau tidak bagi petani maka digunakan analisis imbalan penerimaan dan biaya dirumuskan sebagai:

$$R/C = \frac{PT}{BT} \dots\dots\dots (6)$$

dimana:

R/C = Nisbah antara penerimaan dengan biaya

PT = Penerimaan total

BT = Biaya total yang dikeluarkan oleh petani

- a. Jika  $R/C > 1$ , maka usahatani yang diusahakan mengalami keuntungan.
- b. Jika  $R/C < 1$ , maka usahatani yang diusahakan mengalami kerugian.
- c. Jika  $R/C = 1$ , maka usahatani berada pada titik impas.

#### **b. Analisis Finansial dan Kriteria Kelayakan Investasi**

Dalam Gittinger (1986), analisis finansial memiliki dua pertimbangan khusus yang harus diperhatikan pada masa analisis finansial, yakni :

- a. Melihat pengaruh finansial terhadap usaha pertanian, misalnya secara individu mengenai *family income* yang cukup besar bagi para petani serta rangsangan yang cukup bagi para petani agar mau ikut berpartisipasi.
- b. Analisis finansial harus dihubungkan dengan hasil yang diperoleh untuk kepentingan umum ataupun organisasi-organisasi komersial

seperti koperasi, bank ataupun penyalur-penyalur (*distributor*) swasta.

Menurut Kadariah (2001), kelayakan investasi terdiri atas beberapa kriteria, baik manfaat dan biayanya dinyatakan dalam nilai sekarang. Kriteria kelayakan yang bisa digunakan adalah :

a. *Gross B/C Ratio*

*Gross B/C ratio* adalah perbandingan antara total benefit terhadap total yang dikeluarkan. Kriteria kelayakan yang digunakan adalah :

- i. Bila  $Gross\ B/C > 0$ , maka usaha layak untuk dijalankan.
- ii. Bila  $Gross\ B/C < 0$ , maka usaha tidak layak untuk dijalankan.
- iii. Bila  $Gross\ B/C = 0$ , maka usaha berada pada keadaan *break even point*.

b. *Net B/C Ratio*

*Net B/C Ratio* merupakan perbandingan antara *present value* dari *net benefit* yang positif dengan *present value* dari *net benefit* yang negatif (*net costs*). Kriteria kelayakannya adalah :

- i. Bila  $Net\ B/C > 0$ , maka usaha dikatakan menguntungkan.
- ii. Bila  $Net\ B/C < 0$ , maka usaha yang dilakukan dikatakan tidak menguntungkan.
- iii. Bila  $Net\ B/C = 0$ , maka usaha pada keadaan *break even point*.

c. *Net Present Value*

*Net Present Value* (NPV) merupakan metode yang menghitung selisih antara penerimaan dengan biaya/ pengeluaran. Kriteria kelayakan yang digunakan adalah :

- i. Bila  $NPV > 0$ , maka usaha yang dilakukan menguntungkan.
- ii. Bila  $NPV < 0$ , maka usaha yang dilakukan tidak menguntungkan.
- iii. Bila  $NPV = 0$ , maka usaha yang dilakukan berada pada keadaan *break even point*.

d. *Internal Rate of Return*

*Internal Rate of Return* (IRR) merupakan suatu tingkat bunga yang menunjukkan tingkat bunga yang menunjukkan nilai bersih sekarang (NPV) sama dengan jumlah seluruh investasi proyek atau usaha sama dengan nol. Kriteria kelayakannya adalah :

- i. Bila  $IRR >$  tingkat suku bunga, maka usaha yang dilakukan menguntungkan.
- ii. Bila  $IRR <$  tingkat suku bunga , maka usaha yang dilakukan tidak menguntungkan.
- iii. Bila  $IRR =$  tingkat suku bunga, maka usaha yang dilakukan berada pada keadaan *break even point*.

e. *Payback Period* (Pp)

*Payback period* menunjukkan jumlah tahun yang diperlukan untuk memperoleh kembali semua modal yang telah diinvestasikan. Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :

- 1) Bila masa pengembalian (Pp) lebih pendek dari umur ekonomis usaha maka usaha tersebut layak untuk dijalankan.
- 2) Bila masa pengembalian (Pp) lebih panjang dari umur ekonomis usaha maka usaha tersebut tidak layak untuk dijalankan.

#### **4. Kemitraan dan Kelembagaan**

##### **a. Kemitraan**

Bergerak di bidang usaha perkebunan kelapa sawit membutuhkan pengelolaan yang tidak sederhana. Lahan yang luas, juga dibutuhkannya manajemen yang baik dalam mengatur roda produksi dan sumber daya karena rawannya konflik yang berkaitan dengan hukum, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat sehingga perlu dibangun manajemen yang kuat dan mapan untuk menghadapi berbagai persoalan yang kerap dihadapi. Solusi terbaik dari hal ini ialah dengan membangun sistem kemitraan. Sistem kemitraan diharapkan dapat membangun harmonisasi hubungan yang saling menguntungkan, khususnya antara perusahaan perkebunan dan masyarakat di sekitarnya.

Usaha kemitraan didefinisikan sebagai kerjasama antara usaha kecil dan menengah atau dengan usaha besar, disertai pembinaan dan pengembangan usaha dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Program kemitraan adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN (PTPN VII, 2010). Menurut (Hermawan, et al., 1998), prinsip kemitraan ditandai oleh adanya azas kesejajaran kedudukan mitra, azas saling membutuhkan dan azas saling menguntungkan yang merupakan persetujuan antara dua atau lebih perusahaan untuk saling berbagi biaya, resiko dan manfaat.

Jaringan kerjasama kemitraan sebagai lembaga penggerak agribisnis sangat dibutuhkan demi tercapainya pemenuhan kebutuhan akan produk pertanian. Hubungan kerjasama ini dapat berjalan efektif dan saling menguntungkan bila:

- a. Hubungan yang bersifat *interdependen*, yaitu bentuk kerjasama yang saling membutuhkan dan keberadaan satu pihak tidak membebani pihak lain yang saling bekerjasama.
- b. Hubungan yang bersifat *egaliter* dan adil, yaitu bentuk kerjasama yang saling menghargai, tidak terjadi eksploitasi terhadap pihak lain dengan keuntungan/ kepentingan sepihak.
- c. Masing-masing pihak menyadari kebutuhan satu sama lain dan memelihara hubungan untuk dapat memenuhi kebutuhan satu sama lain.

- d. Masing-masing dapat dipercaya dan diandalkan dalam menjaga kualitas (mutu) dalam pemenuhan kebutuhan tersebut, sehingga menghasilkan sinergi berupa daya saing bersama dan kepentingan bersama.

Faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk menjamin kemitraan atau kerjasama antara kedua belah pihak berhasil antara lain harus ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik para pelaku usaha kemitraan akan membuat lawan bicaranya memahami maksud dan berusaha mencapai klaim-klaim kesahihan (Fadjar, 2006), dan arah orientasi yang jelas, profesionalisme serta saling menguntungkan (*win-win solution*) (Utomo dan Anang, 2003).

Pelaksanaan kemitraan secara sehat dengan usaha kecil memerlukan upaya khusus, misalnya pembinaan yang tidak hanya terbatas pada pembinaan finansial dan teknis akan tetapi termasuk manajemen. Berkembangnya kemitraan usaha merupakan indikasi dari sudah mulai berubahnya strategi usaha agar setiap pihak yang bersaing dapat menang dalam setiap sasarannya. Kemitraan usaha perkebunan diharapkan mampu mensinergikan kekuatan para pelaku utama usaha kemitraan (petani dan perusahaan) serta kekuatan beberapa unsur penunjang lainnya seperti pemerintah, lembaga keuangan nasional, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian, dan perguruan tinggi (Fadjar, 2006).

Dalam rangka membangun kemitraan usaha, ikut campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam beberapa aspek; yaitu pertama, mengarahkan kelembagaan ekonomi koperasi, terutama KUD untuk menjadi bagian dari jaringan agribisnis; kedua, mengkonsolidasikan mengenai penggunaan lahan petani; ketiga, membuat perangkat hukum yang mendukung sehatnya perkembangan kemitraan usaha, terutama yang ditujukan untuk melindungi hak-hak individu petani dari bahaya eksploitasi pemodal besar, dan pengurusan sumberdaya alam yang menjadi basis usaha di sektor pertanian; keempat, menciptakan kondisi yang kondusif, misalnya pengembangan prasarana ekonomi, pengkajian dan penerapan teknologi, kemudahan pelayanan perkreditan dan pengembangan sistem informasi pasar; dan kelima, membuat status pilot project dengan tahap awal melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), koperasi dan kemitraan usaha di daerah (Sudaryanto dan Pranadji, 1999).

Melalui sistem kemitraan yang dibangun, perusahaan bisa mendeteksi secara dini seluruh gejala negatif yang muncul yang akan berakibat merugikan perusahaan. Kepercayaan, pengharapan, kompetensi, produktivitas, dan kinerja pun bisa dibangun dan dikelola dengan baik. Pengembangan kemitraan akan mengikat sisi psikologis dan kesepahaman di antara berbagai pihak. Dengan demikian, roda produksi dan sumber daya akan berjalan signifikan sesuai yang diharapkan.



Sistem kemitraan memiliki tiga pola, yaitu pola Perusahaan Inti Rakyat (PIR), pola Kredit Koperasi Primer kepada Anggota (KKPA), dan pola Program Revitalisasi Perkebunan (PRP). Ketiga pola ini sama-sama membangun dasar kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, memperkuat, bertanggung jawab, dan saling ketergantungan dengan masyarakat di sekitar perkebunan sebagai plasma. Prinsipnya, kedua belah pihak saling terbuka dan percaya sehingga saling menguntungkan dan membutuhkan (Farida, 2009).

Menurut Farida (2009), terdapat 5 pola kemitraan usaha yang dapat dilakukan antara petani dengan pengusaha besar, antara lain :

1) Pola kemitraan inti-plasma

Pola kemitraan ini merupakan pola hubungan antara petani, kelompok tani atau kelompok mitra sebagai plasma dengan perusahaan inti yang bermitra usaha. Perusahaan bertindak dalam menyediakan lahan, sarana produksi, bimbingan teknis, manajemen, menampung dan mengolah, serta memasarkan hasil produksi. Kelompok mitra bertugas memenuhi kebutuhan perusahaan inti sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

2) Pola kemitraan subkontrak

Pola kemitraan ini merupakan pola kemitraan antara kelompok mitra usaha dengan perusahaan mitra usaha yang memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya.

3) Pola kemitraan dagang umum

Pola kemitraan dagang umum merupakan hubungan usaha dalam pemasaran hasil produksi. Pihak yang terlibat dalam pola ini adalah pihak pemasaran dengan kelompok usaha pemasok komoditas yang diperlukan oleh pihak pemasaran tersebut.

4) Pola kemitraan keagenan

Pola keagenan merupakan bentuk kemitraan yang terdiri dari pihak perusahaan mitra dan kelompok mitra atau pengusaha kecil mitra. Pihak perusahaan mitra memberikan hak khusus kepada kelompok mitra untuk memasarkan barang atau jasa perusahaan yang dipasok oleh pengusaha besar mitra. Perusahaan besar/ menengah bertanggungjawab atas mutu dan volume produk (barang dan jasa), sedangkan usaha kecil mitranya berkewajiban memasarkan produk atau jasa. Di antara pihak-pihak yang bermitra terdapat kesepakatan tentang target-target yang harus dicapai dan besarnya *fee* atau komisi yang diterima oleh pihak yang memasarkan produk.

5) Pola kerjasama operasional agribisnis (KOA),

Pola kemitraan KOA merupakan pola hubungan bisnis yang dijalankan oleh kelompok mitra dan perusahaan mitra. Kelompok mitra menyediakan sarana produksi seperti lahan, sarana, dan tenaga kerja, sedangkan perusahaan hanya menyediakan modal, biaya, manajemen, dan pengadaan sarana produksi untuk mengusahakan atau membudidayakan suatu komoditas pertanian.

Perusahaan mitra juga berperan sebagai penjamin pasar produk dengan meningkatkan nilai tambah produk melalui pengolahan dan pengemasan.

## **b. Sistem Kelembagaan**

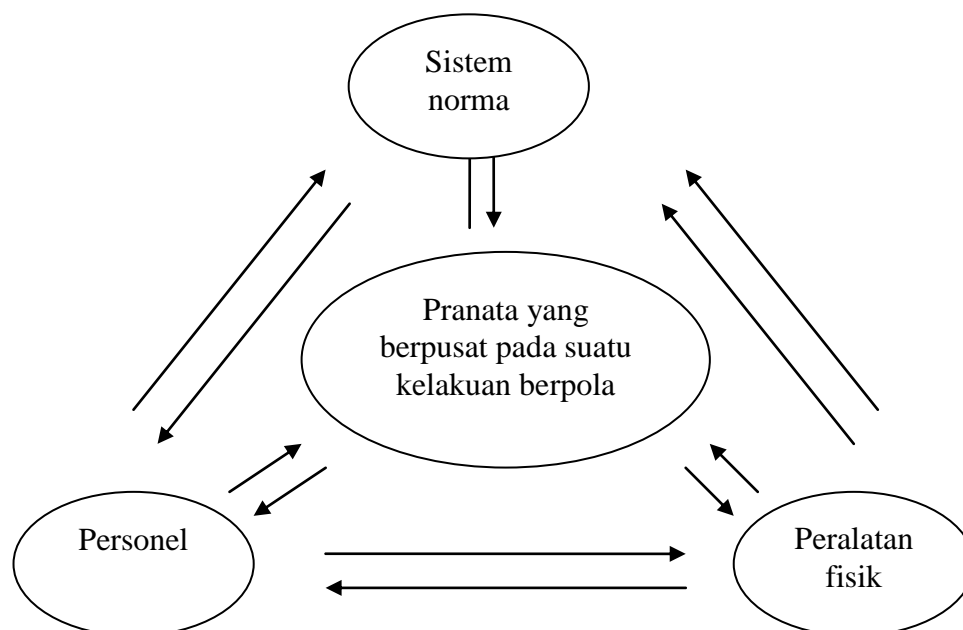
Pemahaman terhadap konsep lembaga atau kelembagaan (institusi) sejauh ini lebih terpaku pada organisasi, baik organisasi formal maupun organisasi non-formal. Konvensi Uphoff (1992) dan Fowler (1992) menyatakan bahwa suatu lembaga dapat berbentuk organisasi, atau sebaliknya. Suatu lembaga dapat berbentuk organisasi seperti pemerintah, bank, partai, perusahaan dan lain-lain. Institusi dapat juga berupa tata peraturan seperti hukum atau undang-undang, sistem perpajakan, tata kesopanan, adat-istiadat, dan lain-lain. Fungsi organisasi dan lembaga lokal antara lain adalah: (a) mengorganisir dan memobilisasi sumberdaya; (b) membimbing *stakeholder* pembangunan dalam membuka akses ke sumberdaya produksi; (c) membantu meningkatkan *sustainability* pemanfaatan sumberdaya alam; (d) menyiapkan infrastruktur sosial di tingkat lokal; (e) mempengaruhi lembaga-lembaga politis; (f) membantu menjalin hubungan antara petani, penyuluh dan peneliti lapang; (g) meningkatkan akses ke sumber informasi; (h) meningkatkan kohesi sosial; (i) membantu mengembangkan sikap dan tindakan koperatif.

Menurut Cornelis (2005), kelembagaan masyarakat di pedesaan umumnya terbentuk melalui dua tahap, yaitu berawal dari:

- a. Ikatan sosial (*social relation*), antara anggota masyarakat yang masih kuat. Hubungan ini menciptakan kesepakatan, aturan dan kewajiban sosial (*social obligation*) masyarakat di pedesaan yang mengikat semua anggota. Di beberapa daerah, peran dari lembaga adat masih cukup dominan.
- b. Hubungan ekonomi (*economic relation*), bahwa setiap pertukaran barang dan pelayanan jasa selalu memperhitungkan imbalan ekonomi dan selalu dikaitkan dengan perhitungan untung rugi. Hubungan ekonomi antar golongan masyarakat kemudian berkembang menjadi kewajiban ekonomi dengan berbagai aturan yang bersifat lebih baku dan lebih mengikat semua anggota masyarakat pedesaan.

Jika pasar tidak mampu mengkoordinasikan partisipan antarmasing-masing subsistem dalam sistem agribisnis maka organisasi bisnis petani (kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi petani) menjadi sangat penting sebagai wadah koordinasi atau integrasi antarpartisipan dalam sistem agribisnis. Disinilah hakekat pentingnya koperasi sebagai organisasi bisnis petani dalam mengendalikan fenomena biaya transaksi tinggi hingga ke tingkat minimum dibandingkan dengan alternatif transaksi yang ada (Zakaria, 2002). Esensi organisasi petani menunjukkan bahwa keragaan organisasi bisnis petani (kelompok tani dan koperasi) sangat ditentukan oleh pengembangan sumber daya manusia (*humanware*), pengembangan teknologi (*technoware*), dan pengembangan kelembagaan atau aturan main (*software*).

Menurut Koentjaraningrat (2002), komponen-komponen yang menjadi bagian dari hubungan kelembagaan antara badan usaha dengan petani, meliputi personel (orang), peralatan fisik (sarana dan prasarana), sistem norma (aturan-aturan), serta kelakuan yang berpola baik dari perusahaan maupun petani. Hubungan antar komponen dari pranata sosial yang akan diteliti dalam lingkup kelembagaan dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Komponen-komponen dari Pranata Sosial  
Sumber: Koentjaraningrat, 2002

Tujuan kelembagaan (*institutional goal*) merupakan faktor terpenting yang seyogyanya dipahami secara mendalam. Tujuan komunal suatu lembaga lokal memiliki daya ikat sosio-teknis yang besar. Upaya perubahan sosial melalui rekayasa (atau lebih tepat: penyesuaian struktur) kelembagaan akan lebih mudah terlaksana bila memiliki tujuan yang jelas. Upaya perubahan sosial melalui rekayasa kelembagaan hendaknya memenuhi prasyarat berikut: (a) memiliki dampak yang jelas dan dapat dicapai oleh para *stakeholder*, (b) tersedia sistem pendukung internal (pengetahuan

*stakeholder*) dan eksternal (infrastruktur fisik dan sosial lain), dan (c) *stakeholder* bersedia berpartisipasi. Ketiga elemen ini saling terkait satu sama lain dan kekurangan salah satu faktor saja akan memperlambat upaya perubahan sosial setempat. Introduksi lembaga baru yang bersifat koersif dan *top-down* banyak menemukan halangan dalam mencapai tujuannya karena lemahnya partisipasi *stakeholder* dan berbedanya persepsi tujuan kelembagaan. Sebaliknya introduksi norma tanam serempak mampu dipahami tujuan dan jelas dampaknya sehingga di beberapa lokasi bahkan menggeser peran lembaga tata pengaturan kegiatan usahatani tradisional.

## **5. Kesejahteraan Petani Plasma**

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (2010) mengungkapkan bahwa pengembangan pola PIR-Trans memberikan kesejahteraan bagi petani plasma. Beberapa kasus yang terjadi, antara lain: 1) petani dari Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) yang berada di Desa Pematang Tinggi, Kecamatan Krukut, Kabupaten Pelalawan, Riau, saat ini berkembang menjadi desa yang taraf ekonominya tumbuh pesat dengan rata-rata penghasilan penduduknya mencapai Rp 3 juta/ kaveling/ bulan (kaveling = 2 ha lahan dan 0,5 ha pekarangan) dengan mayoritas penduduk bekerja sebagai petani plasma sawit; 2) petani di Di Desa Makmur Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, dimana sebagian besar penduduk memiliki kebun sawit dan berprofesi sebagai petani plasma, dengan penghasilan berkisar Rp 2,5 juta/kaveling/bulan.

Bangunan tempat tinggal petani kelapa sawit yang pada awalnya terbuat dari papan kayu saat ini telah menjadi bangunan permanen. Pertumbuhan jumlah penduduk didorong pula oleh terbukanya lapangan kerja dan peluang usaha di Desa Makmur.

## 6. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Menurut Ratnawati (2010), tingkat efektivitas pelaksanaan kemitraan kelapa sawit dalam mencapai tujuan kemitraan selama ini sudah berjalan efektif yaitu dapat dilihat dari rata-rata pencapaian persentase skor harapan dari keseluruhan aspek sebesar 73,52% yang termasuk dalam kategori efektif. Semakin baik pelaksanaan kemitraan dalam memperbaiki manajemen usahatani guna meningkatkan produktivitas petani mitra, semakin tinggi tingkat efektivitas kemitraan. Begitu pula, semakin buruk pelaksanaan kemitraan dalam memperbaiki manajemen usahatani, semakin rendah pula tingkat efektivitas kemitraan.

Menurut Budi Kurniawan (2006), pola kemitraan kelapa sawit di Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan pada tingkat suku bunga 15%, secara finansial menguntungkan dengan *Gross B/C* sebesar 1,24; *Net B/C* sebesar 1,86; NPV sebesar Rp.36.002.756; IRR sebesar 19,92%, dan *Payback period* 9,05 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa perkebunan kelapa sawit pola kemitraan di Kecamatan Bahuga Kabupaten Way Kanan layak dikembangkan.

## B. Kerangka Berpikir

Tanaman perkebunan diakui dapat menyumbangkan kontribusi yang cukup besar dalam pemenuhan bahan baku agroindustri bahkan penghasil devisa negara. Salah satu komoditi perkebunan yang banyak berperan adalah kelapa sawit. Kelapa sawit mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya (seperti kacang kedele, kacang tanah dan lain-lain), sehingga harga produksi menjadi lebih ringan. Masa produksi kelapa sawit yang cukup panjang (25 tahun) juga akan turut mempengaruhi ringannya biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha kelapa sawit. Kelapa sawit juga merupakan tanaman yang paling tahan hama dan penyakit dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya. Jika dilihat dari konsumsi per kapita minyak nabati dunia mencapai angka rata-rata 25 kg/th setiap orangnya, kebutuhan ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya konsumsi per kapita (Sihotang, 2010).

Menurut Hasyim (2005), program kemitraan agribisnis melibatkan petani plasma, organisasi kelompok tani, dan perusahaan inti. Pemerintah berperan sebagai regulasi dan fasilitasi, sedangkan tiga pihak yang disebut terdahulu berperan kunci dalam pembangunan kemitraan agribisnis. Pada sisi ini, kelompok tani berperan lebih jauh dan maju, serta bertindak sebagai fasilitator perusahaan inti dan penyambung serta pembawa aspirasi masyarakat petani.



Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang “Sistem Budidaya Tanaman” pada pasal 47, 48, dan 49 menyatakan bahwa badan usaha diarahkan untuk bekerjasama secara terpadu dengan usaha petani, sementara pemerintah dapat menugaskan badan usaha untuk mendorong kerjasama, keterpaduan budidaya, pemasaran, dan industri. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor perkebunan Indonesia yang menjadi pihak perusahaan inti. PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) bergerak di bidang usaha agribisnis perkebunan dengan komoditas karet, kelapa sawit, tebu dan teh yang semuanya dikelola dengan teknologi modern, manajemen terpadu dan didukung sumberdaya manusia profesional terkait, serta ditumbuhkan dengan jalan mengembangkan usaha berbasis bisnis inti yang mengarah ke integrasi vertikal.

PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) dalam pengelolaan agribisnis sudah menerapkan teknologi budidaya tanaman untuk perbaikan potensi tanaman maupun peningkatan produktivitas, namun masih saja belum dapat tercapai maksimal karena adanya terjadi *idle* kapasitas. Upaya yang sudah dilakukan dengan intensifikasi masih menentukan upaya ekstensifikasi. Hal ini sejalan dengan upaya perusahaan sebagai *agent of development*, yaitu dengan melibatkan masyarakat pemilik lahan di sekitar unit usaha dengan konsep kemitraan sekaligus dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga merupakan peran sosial perusahaan agar keberadaan perusahaan dirasakan eksistensinya oleh masyarakat sekitar.

Prinsip kemitraan yaitu saling memperkuat, saling menguntungkan, dan saling membutuhkan sesuai Peraturan Pemerintah Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil sangat memberi peluang terlaksananya kemitraan bisnis antara petani, kelompok tani, dan koperasi dengan pihak swasta dalam meningkatkan daya saing produk di pasar domestik maupun internasional. Program kemitraan agribisnis penting bagi daerah atau wilayah yang menghadapi kendala-kendala seperti keterbatasan lahan usahatani dalam skala ekonomi, pemilikan lahan pertanian yang terpecah, rendahnya penguasaan teknologi oleh petani, serta persaingan dalam aspek pemasaran, distribusi, dan rendahnya pendapatan atau kesejahteraan petani. Bagi daerah yang tipis penduduknya, pola kemitraan dikembangkan lebih intensif dan peran perusahaan inti sangat dominan (Hasyim, 2005).

Konsep kemitraan yang menjadi dasar pelaksanaan merupakan upaya kerjasama yang berazaskan saling menguntungkan secara berkesinambungan. Langkah pilihan yang strategis yakni melalui pengembangan komoditas kelapa sawit dengan program, antara lain: pengalihan teknologi terapan, kemandirian pengelolaan agribisnis, memberi peran berfungsinya kelembagaan ekonomi pedesaan dan meningkatkan pasokan bahan baku olah pabrik. Peranan kelembagaan bersifat penting dan strategis karena ternyata ada dan berfungsi di segala bidang kehidupan. Pemberdayaan kelembagaan mengandung makna pengaturan dalam batas yurisdiksi, hak pemilikan, dan aturan representasi yang memiliki implikasi pada kemampuan kelembagaan tersebut dalam hal menjalankan *enforcement*

guna mengatasi permasalahan *free rider*, komitmen, loyalitas dan tuntutan faktor eksternal yang ada pada suatu organisasi (koperasi) sehingga mampu menghasilkan performa yang sesuai dengan harapan. Alasan pemberdayaan kelembagaan koperasi dan kelompok tani secara ekonomi dapat dipandang sebagai upaya menghindari biaya transaksi tinggi yang harus dikeluarkan oleh para anggotanya (karena adanya masalah *free rider*, komitmen, loyalitas dan faktor eksternal) dalam mencapai tujuan organisasi (peningkatan pendapatan dan lain-lain) (Arkadie, 1989).

Komponen-komponen dari pranata sosial yakni sistem norma, personel, dan peralatan fisik, masing-masing saling terkait dengan pranata yang berpusat pada suatu kelakuan berpola dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dalam masyarakatnya (Koentjaraningrat, 2002). Komponen-komponen tersebut menjadi bagian dari hubungan kelembagaan antara badan usaha dengan petani, seperti personel (orang), peralatan fisik (sarana dan prasarana), sistem norma (aturan-aturan), serta kelakuan yang berpola baik dari perusahaan maupun petani.

Kemitraan pada perkebunan kelapa sawit selama ini dipercaya mampu menjembatani kepentingan perusahaan inti (dalam penelitian ini adalah PTPN VII Unit Usaha Bekri) dalam memenuhi pasokan bahan baku dan kepentingan petani mitra dalam meningkatkan kesejahteraan. Berbagai skema atau pola kemitraan telah dikenalkan dan dikembangkan, dari program pemerintah seperti NES, PIR-TRANS, KKPA, hingga berbagai pola bagi hasil yang dikembangkan oleh swasta. Kontribusi PT Perkebunan

Nusantara VII (Persero) dalam melaksanakan program kemitraan ini adalah berupa bantuan pengadaan bibit kelapa sawit yang berkualitas.

Kemitraan diharapkan pula dapat mengatasi kendala yang selama ini menjadi penghambat pengembangan pelaku usaha agribisnis, baik dalam hal teknis budidaya, produksi, pemasaran, maupun pendanaannya. Hal terpenting adalah pola kemitraan menjanjikan dihasilkannya kemajuan kegiatan usaha yang sejajar antara perusahaan inti dengan plasma. Bagi perbankan, pola kemitraan ini juga relatif cukup aman untuk diberikan kredit. Kemitraan juga dapat mengatasi kendala agunan bagi plasma, melalui mekanisme adanya jaminan avalis dari perusahaan inti. Pola kemitraan ini juga memberikan peluang bagi perbankan untuk dapat lebih meningkatkan penyaluran kreditnya, karena dalam kemitraan, kredit perbankan dapat diberikan baik kepada inti saja, atau plasma saja, atau kepada inti dan plasma secara bersama-sama (Sutrisno, 2010).

Untuk menunjang keberhasilan usahatani kelapa sawitnya, petani mitra menyediakan bahan baku pertanian secara kontinu dengan jumlah tepat yang sangat diperlukan. Produksi yang dihasilkan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: luas lahan ( $X_1$ ), jenis bibit ( $X_2$ ), alat-alat produksi ( $X_3$ ), jumlah pupuk ( $X_4$ ), jumlah tenaga kerja ( $X_5$ ), dan manajemen ( $X_6$ ). Apabila dinyatakan dalam persamaan adalah sebagai berikut:

$$Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6) \dots\dots\dots (8)$$

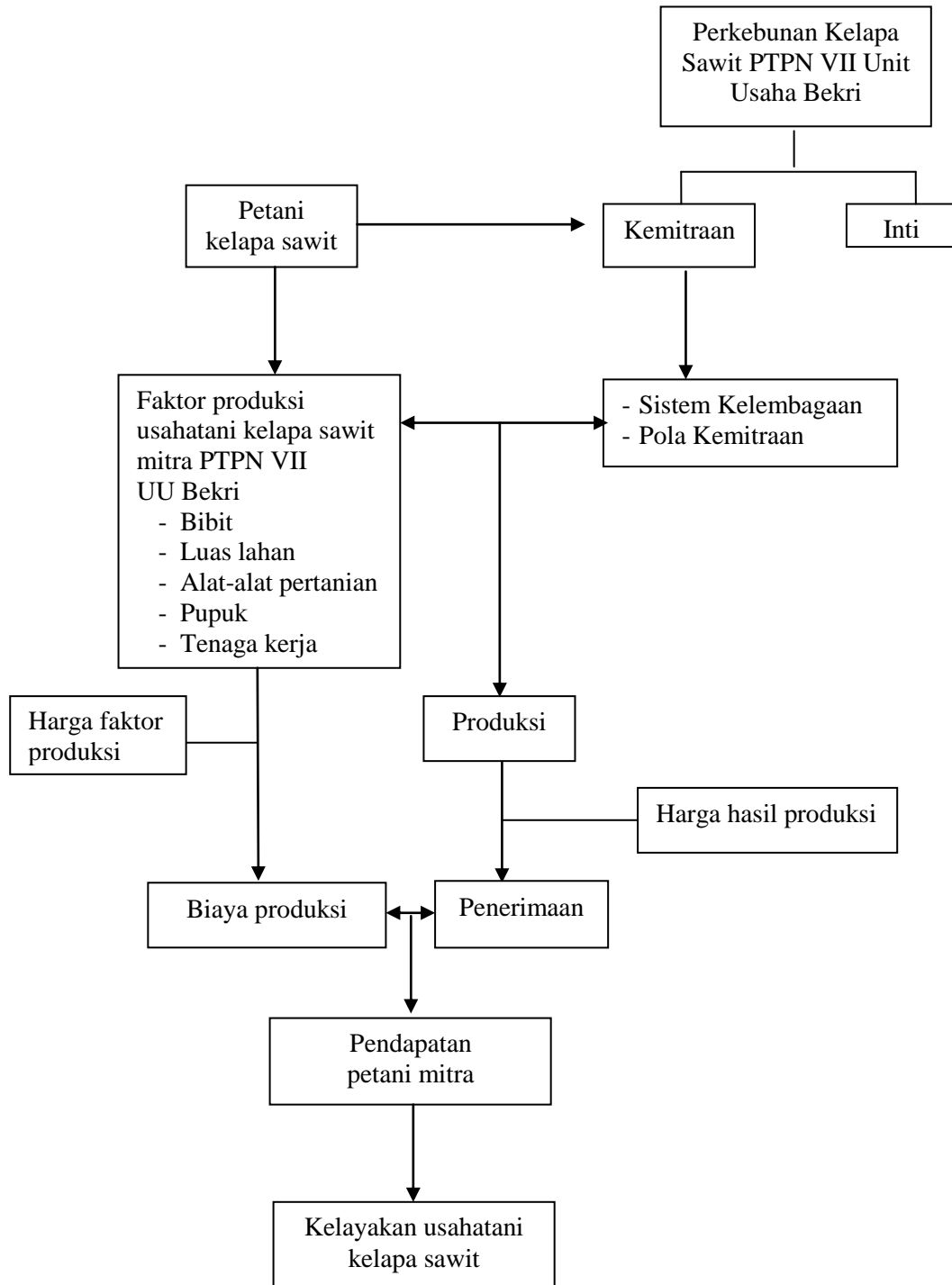
Bibit yang digunakan petani mitra berupa bibit kelapa sawit berkualitas dari PT Perkebunan Nusantara VII (Persero). Luas lahan merupakan luasan lahan yang dimiliki dan dikelola petani kelapa sawit mitra untuk usahatani kelapa sawit. Pupuk yang digunakan adalah beberapa jenis pupuk yang digunakan dalam upaya peningkatan produktivitas kebun. Tenaga kerja adalah tenaga kerja dalam maupun luar keluarga yang melakukan usahatani petani kelapa sawit mitra. Manajemen meliputi manajemen/ pengaturan dalam melakukan budidaya tanaman maupun sumber daya manusianya.

Hasil panen petani kelapa sawit mitra merupakan produksi yang kemudian dijual ke PTPN VII Unit Usaha Bekri sehingga menghasilkan penerimaan petani tersebut. Pendapatan/ keuntungan petani adalah penerimaan yang diperoleh petani kelapa sawit mitra setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan secara tunai selama proses produksi. Biaya yang dikeluarkan dalam bentuk tunai dalam hal ini biaya pembelian pupuk, bibit, upah, tenaga kerja dan biaya penyusutan alat-alat pertanian dalam satu kali musim tanam petani kelapa sawit mitra.

Kelapa sawit yang merupakan komoditi tahunan membutuhkan sejumlah pertimbangan untuk mengetahui keuntungan usahatani yang salah satunya adalah dengan melakukan analisis keuangan atau analisis finansial. Analisis finansial merupakan perbandingan antara pengeluaran dan penerimaan suatu usaha, apakah usaha itu akan menjamin modalnya akan kembali atau tidak, dan apakah usaha tersebut akan dapat dikembangkan lebih luas lagi sehingga dianggap matang secara finansial dan dapat berdiri sendiri.

Analisis finansial juga mencakup semua beban biaya, baik biaya investasi maupun biaya operasional dan perbandingan dengan perkiraan penerimaan atau manfaat (*benefit*) yang diperoleh.

Setelah mengetahui pendapatan/ keuntungan petani kelapa sawit mitra, kemudian dilakukan analisis kuantitatif untuk mengetahui kelayakan finansial usahatani kelapa sawit petani yang bermitra dengan PTPN VII Unit Usaha Bekri di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo. Kerangka berpikir pola kemitraan dan peningkatan pendapatan petani kelapa sawit mitra dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kerangka berpikir pola kemitraan dan pendapatan usahatani kelapa sawit (kasus kemitraan usahatani kelapa sawit antara PT Perkebunan Nusantara VII Unit Usaha Bekri dengan petani mitra di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangun Rejo, Kabupaten Lampung Tengah)